

Efektivitas Penerapan Sistem Informatika Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kota Palangka Raya

Gusti Arifira¹, Muhammad Farras Nasrida², Dedi Takari³, Titin Novianti⁴

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Di era digitalisasi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi merupakan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Salah satu wujud nyata transformasi digital adalah implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diwajibkan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya dengan tujuan mendeskripsikan proses implementasi SIPD secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara langsung kepada pegawai yang terlibat dalam pengoperasian SIPD serta observasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan di lingkungan BKAD. Penelitian ini hadir sebagai upaya mengisi kesenjangan kajian yang belum menyoroti proses implementasi SIPD secara komprehensif dan berkelanjutan pada instansi pengelola keuangan di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai penerapan SIPD sekaligus menjadi bahan acuan bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik ke depannya.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Pengelolaan Keuangan Daerah, Implementasi, Digitalisasi Pemerintah, BKAD

Abstract

In the era of government digitalization, the use of information technology is a fundamental need in realizing transparent and accountable regional financial governance. One of the tangible manifestations of digital transformation is the implementation of the Local Government Information System (SIPD) which is required for all local governments in Indonesia. This research was carried out at the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Palangka Raya City with the aim of describing the SIPD implementation process as a whole, starting from the budget planning stage, implementation, administration, to regional financial reporting. The approach used is qualitative descriptive through direct interviews with employees involved in the operation of SIPD and observation of financial management activities within BKAD. This research is present as an effort to fill the gap in the study that has not highlighted the comprehensive and sustainable implementation process of SIPD in financial management agencies in the Central Kalimantan region, especially Palangka Raya City. The results of this study are expected to be able to provide an objective overview of the implementation of SIPD as well as serve as a reference for improving the quality of better regional financial management in the future.

Keywords: SIPD, Regional Financial Management, Implementation, Government Digitalization, BKAD

Korespondensi:

Gusti Arifira

(gustiarifira@gmail.com)

Submit: 25 April 2026

Revisi: 26 Mei 2026

Diterima: 10 Juni 2026

Terbit: 18 Juni 2026



1. Pendahuluan

Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah memperbaiki good governance penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangannya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyentuh langsung kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sejalan dengan itu, reformasi di bidang keuangan daerah terus didorong oleh pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan yang mengarah pada sistem pengelolaan yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi informasi.

Landasan hukum pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah diatur secara tegas melalui sejumlah regulasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kerangka regulasi ini menjadi dasar kuat bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk terus berbenah dalam tata kelola keuangannya, termasuk melalui penerapan sistem informasi berbasis digital.

Sebagai bentuk nyata dari dorongan digitalisasi tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses pengelolaan keuangannya. Menurut Maulani, Anshori, dan Andriani (2024) dalam jurnal JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, SIPD merupakan inovasi teknologi dalam pemerintahan yang dirancang sebagai alat untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Sementara itu, Andhayani (2023) dalam Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen menambahkan bahwa SIPD pada dasarnya merupakan sistem e-budgeting yang bertujuan mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah melalui pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan terstandarisasi secara nasional.

Meskipun penerapan SIPD telah diwajibkan secara nasional, berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses implementasinya di lapangan belum berjalan seragam di setiap daerah. Adisi dan Sadad (2022) dalam Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial yang meneliti BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu menemukan bahwa SIPD telah berjalan cukup efektif dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Nasution dan Nurwani (2021) dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan yang mengkaji penerapan SIPD pada BPKAD Kota Medan. Di sisi lain, Ekaputra (2021) menemukan kondisi sebaliknya, di mana implementasi SIPD di Kabupaten Nganjuk dinilai belum sepenuhnya efektif akibat berbagai hambatan teknis dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD sangat bergantung pada kondisi, kesiapan, dan konteks masing-masing daerah.

Kondisi tersebut juga relevan bagi wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui BKAD telah berupaya mendorong penguatan implementasi SIPD melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis SIPD Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan, dengan harapan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efisien, akuntabel, dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penguatan implementasi SIPD di wilayah Kalimantan Tengah masih terus berjalan dan memerlukan perhatian serius. Namun demikian, kajian ilmiah yang secara khusus mengkaji proses implementasi SIPD di BKAD Kota Palangka Raya masih sangat minim. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera dengan pendekatan kuantitatif, sehingga belum mampu menggambarkan proses implementasi SIPD secara mendalam dan kontekstual di wilayah Kalimantan Tengah. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini, yaitu untuk mengkaji secara langsung bagaimana SIPD diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kota Palangka Raya melalui pendekatan kualitatif deskriptif

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya selama kegiatan magang mandiri berlangsung. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada kegiatan penginputan data administrasi keuangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas penginputan SIPD, wawancara dengan pegawai BKAD yang terlibat dalam pengoperasian SIPD, serta penyebaran kuesioner kepada pegawai terkait pelayanan administrasi keuangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, regulasi, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan implementasi SIPD.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner pre-test serta post-test. Kuesioner diberikan sebelum pelaksanaan magang dan setelah pelaksanaan magang guna mengetahui adanya perbedaan persepsi pegawai terhadap kualitas pelayanan administrasi keuangan setelah adanya bantuan penginputan data SIPD. Indikator yang digunakan meliputi kecepatan pelayanan, ketepatan penginputan data, kemudahan akses informasi, dan efisiensi administrasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil observasi, wawancara, serta kuesioner dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas implementasi SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kota Palangka Raya.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BKAD Kota Palangka Raya memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. SIPD membantu proses administrasi menjadi lebih terintegrasi sehingga proses perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, proses penginputan data keuangan melalui SIPD membantu mempercepat pelayanan administrasi keuangan daerah. Penginputan data dilakukan secara rutin sesuai dokumen yang diterima dari perangkat daerah sehingga mempermudah proses verifikasi dan pengolahan data keuangan.

Hasil wawancara dengan pegawai BKAD menunjukkan bahwa penerapan SIPD mempermudah pencarian data, meningkatkan ketelitian administrasi, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan dibandingkan sistem manual sebelumnya. Selain itu, penggunaan SIPD juga membantu meningkatkan transparansi karena data dapat dipantau secara langsung dalam sistem.

Hasil kuesioner sebelum pelaksanaan magang menunjukkan bahwa sebagian pegawai masih mengalami kendala dalam proses administrasi akibat banyaknya dokumen yang harus diproses dan keterbatasan tenaga penginput data. Setelah adanya bantuan penginputan selama kegiatan magang, pegawai menilai bahwa pelayanan menjadi lebih cepat, proses administrasi lebih tertata, dan waktu penyelesaian dokumen menjadi lebih efisien.

Implementasi SIPD masih menghadapi beberapa hambatan, seperti gangguan jaringan internet, perubahan sistem yang mengikuti pembaruan dari pemerintah pusat, serta perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pengoperasian aplikasi. Kendala tersebut menyebabkan proses penginputan data terkadang mengalami keterlambatan. Implementasi SIPD di BKAD Kota Palangka Raya dapat dikatakan cukup efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah berbasis digital. Penggunaan SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendukung percepatan pelayanan program pemerintah daerah secara lebih transparan dan akuntabel.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya mampu memberikan solusi terhadap permasalahan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dan kurang efisien. Penerapan SIPD membantu meningkatkan efektivitas proses penginputan, pengolahan, hingga pelaporan data keuangan sehingga pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan magang yang dilakukan melalui bantuan penginputan data juga membantu mengurangi beban kerja pegawai serta mempercepat penyelesaian dokumen administrasi keuangan daerah.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat sehingga pengamatan terhadap implementasi SIPD belum dapat dilakukan secara menyeluruh dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian hanya dilakukan pada satu instansi sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya dapat menggambarkan penerapan SIPD pada seluruh organisasi perangkat daerah lainnya. Penelitian ini juga masih terbatas pada observasi, wawancara, dan kuesioner sederhana selama kegiatan magang sehingga data yang diperoleh belum sepenuhnya mendalam. Oleh karena itu, disarankan agar pihak BKAD terus meningkatkan kualitas jaringan internet, melakukan pelatihan secara berkala kepada pegawai terkait penggunaan SIPD, serta menambah sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem agar proses administrasi keuangan dapat berjalan lebih optimal. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas dan waktu penelitian yang lebih panjang sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Saptiany, S. G., Putra, D. T., Mistriani, N., Kamarulzaman, W. N. B., Naharia, A., & Sunarko, I. H. (2025). Analisis penerapan uji kompetensi mahasiswa menyiapkan tenaga kerja profesional industri pariwisata upaya keberlanjutan di Indonesia. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 410–419. <https://doi.org/10.56910/sewagati.v4i2.2910>
- Afriansyah, A., & Susanti, R. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 55–66. <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/595/391>
- Pratama, R., Sari, N., & Wijaya, D. (2024). Pelatihan digital marketing dalam meningkatkan penjualan UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 112–120. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/download/1033/1078/2057>
- Rahman, A., & Fitriani, D. (2024). Implementasi pelayanan publik berbasis digital pada instansi pemerintah daerah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(1), 88–97. <https://www.ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI>
- Saputra, M., & Lestari, P. (2024). Strategi pengembangan ekonomi daerah berbasis sektor pariwisata. *Warmadewa Economic Development Journal*, 7(1), 21–30. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wedj/article/view/11848>
- Hidayat, T., & Ramadhani, S. (2024). Analisis laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. *RISMA: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2), 44–53. <https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/955/460>
- Kurniawan, E., & Maulida, N. (2024). Efektivitas sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik. *Tata Sejuta: Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 75–84. <https://ejournalstiamataram.ac.id/index.php/tatasejuta/article/view/528/178>